

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik itu secara langsung atau melalui perwakilan atau dapat juga diartikan sebagai pemerintahan rakyat.¹ Demokrasi memiliki konsep evolutif, dinamis, dan bukan statis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik dalam segi bentuk maupun substansinya sesuai konteks dan dinamika dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang.² Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya serta seluas-luasnya dalam memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama termasuk juga gender.³

Berbicara soal gender, istilah gender menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan (kodrat) dan yang bersifat bentukan budaya. Gender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan

¹ Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni. 2019. Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 2. Hal 99

² Muhammad Zulfan Hakim. 2008. Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia. *Laporan Penelitian*. Hukum tata Negara. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin. Hal 2

³ Mohammad Yusuf Pambudi. 2007. Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Hal.1

tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender merujuk pada atribut ekonomi, politik, sosial dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki.⁴

Bangsa yang mengutamakan demokrasi pada kenyataannya masih minim keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikannya. Sementara itu, salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan perempuan di dalamnya.⁵ Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting untuk menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif yang ramah gender. Faktanya representasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan yaitu Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita pada Pasal 2 dan 3.⁶

Peran politik bagi perempuan merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam hidup bermasyarakat. Ditelaah lagi mengenai hak dan kepentingan perempuan perlu dilakukan karena hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara dan berkelanjutan, sebaliknya representasi yang kurang adil dan

⁴ Jacqueline Adhiambo-Oduol. 2003. *The Socio-Cultural Aspects of the Gender Questions. Report of the Constitutions of Kenya Review Commission* Vol. 5 No. 2. Hal. 147

⁵ Vina Salviana Darvina Soerdawo, dkk. 2019. *Sensitivitas Gender dalam Partai Politik di Indonesia dan India*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 24

⁶ Pasal 2 “Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan umum yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi”. Pasal 3 “Wanita mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum yang didirikan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa diskriminasi”.

bias dapat membentuk persepsi masyarakat yang tidak akurat terhadap peran perempuan dalam kehidupan berpolitik.⁷

Berbagai polemik yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan di ranah publik adalah bentuk pemahaman masyarakat umum (*mainstream*) yang menganggap bahwa perempuan yang aktif dan luas bergaul dengan siapapun sering kali dimaknai secara peyoratif (merendahkan). Indikator partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu akses, kontrol, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Realitas menunjukkan bahwa dalam tiga aspek di atas keterlibatan perempuan Indonesia sangat kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam arena politik sangat minim.

Untuk menunjang kesetaraan gender dalam politik, tentunya hal ini memerlukan kerja sama dari semua elemen, baik pemerintah, organisasi, masyarakat sipil maupun umum. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses ini dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.⁸

⁷ Muhammad Iqbal. *Pentingnya Kesadaran Politik: Dialog Pendidikan untuk Perempuan Menuju Pemilu 2024*. <https://stialan.ac.id/v3/pentingnya-kesadaran-politik-dialog-pendidikan-untuk-perempuan-menuju-pemilu-2024/>. Diakses pada 27 Agustus 2024 pukul 22.17.

⁸ Dewi Herita. 2016. *Perempuan dan Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>. Diakses pada Senin, 26 Agustus 2024 pukul 19.45.

Kesadaran gender yang kurang pada masyarakat menjadi faktor terjadinya ketimpangan gender. Kesadaran gender (*gender awareness*) adalah pemahaman tentang berbagai peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Penugasan peran laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang rancu, karena gender dibangun secara sosial dan hal tersebut juga bisa berubah secara sosial.⁹ Sehingga kesadaran gender ini akan berpengaruh pada kehidupan perempuan dalam berbagai tingkatan masyarakat dan berbagai bidang termasuk pada politik. Kesadaran gender ini membutuhkan waktu untuk terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku.

Selaras dengan kesadaran gender, suatu kesadaran menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba seseorang dianggap memiliki kesadaran politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui tentang sistem politik baik mengenai aspek politik maupun aspek pemerintahannya. Kesadaran politik terbagi atas tiga, yaitu kognitif, menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik, peranan dan segala kewajibannya serta *input* dan *output*, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya. Kemudian afektif yaitu menyangkut pola perasaan individu terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya yang dapat membuat seseorang menerima atau menolak sistem politik itu. Terakhir evaluatif yaitu menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.¹⁰

⁹ Ikhlasiah Dalimoentha. 2020. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 13

¹⁰ Gabriel Almond dan Sidney Verba. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara. Hal 55.

Kesadaran politik tentunya dapat menunjang keterwakilan bagi pemegang kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan adanya keterikatan antara kesadaran politik oleh masyarakat dalam perilaku yang dihadirkan saat memilih, menjadi rangkaian yang sangat menarik terutama jika dikaitkan dengan pemilih tanpa melihat gendernya baik itu oleh pemilih laki-laki ataupun pemilih perempuan. Kesadaran politik yang dimiliki masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih untuk memilih kandidat yang mampu mewakili kepentingan setiap masyarakat termasuk memilih kandidat perempuan.

Muncullah kesadaran politik gender yang dapat diartikan sebagai pemahaman dan kesadaran individu tentang bagaimana gender mempengaruhi struktur politik, kebijakan publik dan kesempatan berpartisipasi di dalamnya. Kesadaran ini tentunya mencakup pemahaman bahwa gender bukan hanya berkaitan dengan perbedaan biologis tetapi juga dalam politik termasuk dalam hal representasi politik.¹¹ Kesadaran gender dan kesadaran politik dapat mempengaruhi bagaimana perilaku politik seseorang.

Dalam hal ini, perilaku memilih merupakan tindakan masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilu. Dalam teori perilaku memilih, terdapat tiga pendekatan yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang dalam memberikan pilihannya, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.¹² Pendekatan sosiologis, yang didasarkan pada karakteristik sosial dan pengelompokan pada

¹¹ Moamenla Amer. 2017. The Gendered Analysis of Political Awareness. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 78 No. 3

¹² Ramlan Surbakti. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

sosial. Pendekatan psikologis, berkaitan dengan fenomena pikiran manusia dalam tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang mempengaruhi akal individu yang berkaitan dengan ilmu politik. Pendekatan rasional, yakni kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan dalam pemilu. Ini menandakan bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Salah satu faktor yang menarik untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pendekatan psikologis yaitu orientasi terhadap kandidat yang merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kandidat yang dicalonkan dalam Pemilu.

Kesadaran dan perilaku yang dihadirkan oleh masyarakat ini mendorong keterwakilan perempuan terpilih signifikan pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Bukittinggi. Keterwakilan perempuan yang terpilih ada sebanyak delapan orang, hal ini juga melebihi kuota keterwakilan perempuan 30% yaitu sebesar 32%. Tentunya kesadaran yang ada membawa potensi pada perempuan menjadi pemimpin juga layak. Judith Squires berpendapat bahwa politisi perempuan yang terlibat dapat membangun kelompok-kelompok gender khususnya kebijakan-kebijakan terhadap perempuan dapat terwakili.¹³ Dengan adanya perwakilan perempuan yang duduk di kursi parlemen, maka peraturan yang memuat kepentingan perempuan akan terpenuhi. Masyarakat yang semakin terbuka dengan terhadap kandidat perempuan dapat memberikan suara mereka dengan berbagai pertimbangan dari faktor sosiologis, psikologis maupun rasional.

¹³ Judith Squires. 1999. *Gender in Political Theory*. USA. Blackwell Publishers Ltd.

Terlihat bahwa kesadaran politik gender yang dimiliki masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh pemahaman mereka bahwa representasi yang adil antara laki-laki dan perempuan penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan inklusif. Mereka percaya bahwa perspektif dan pengalaman perempuan penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili kebutuhan seluruh masyarakat. Keikutsertaan perempuan pada bidang politik juga dapat memberikan pendapat yang baik pada proses terbentuknya suatu peraturan ataupun kebijakan berkaitan dengan kaum perempuan, karena dianggap lebih mengetahui tentang hal-hal khusus yang dibutuhkan dan hal ini hanya dapat dimengerti oleh perempuan.¹⁴

Penelitian tentang kesadaran politik telah dilakukan oleh Ririn Edfandiyani Putri pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sijunjung, ditemukan bahwa kesadaran politik tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik pada Pileg tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung terkhusus kepada pemilih perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti rata-rata pemilih perempuan lebih condong memilih kandidat laki-laki dengan asumsi telah yakin dengan kandidat yang dipilih. Hal ini dikarenakan tidak diimbangi dengan semangat dalam menggali informasi mengenai kandidat yang nantinya dapat mewakili kepentingan masyarakat khususnya perempuan.¹⁵

¹⁴ Hevriansyah, A. 2021. Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol 1 No 1 Hal. 67-85.

¹⁵ Ririn Edfandiyani. 2019. Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sijunjung. *Skripsi*. Universitas Andalas.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Maulud Ilham Chareld tahun 2023 dengan judul Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, ditemukan bahwa kesadaran politik menjadi faktor yang dominan untuk mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperlihatkan bahwasanya semakin baik kesadaran politik seseorang semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam Pemilu dengan keeratan hubungan yang dimiliki sangat kuat lama mempengaruhi tingkat partisipasi politik.¹⁶ Penelitian lainnya tentang kesadaran politik juga dilakukan oleh Akbar Asyari tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Politik Masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, ditemukan bahwa kesadaran politik memiliki pengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pemilih masyarakat Kota Bukittinggi dan dinilai cukup tinggi.¹⁷

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran politik hanya memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih dan menguji bagaimana faktor-faktor tersebut memiliki korelasi dengan partisipasi politik sehingga ikut memberikan suaranya. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin menguji bagaimana indikator kesadaran politik menurut Almond dan Verba yaitu kognitif, afektif dan evaluatif yang dikaitkan dengan kesadaran

¹⁶ Maulud Ilham Chareld. 2023. Hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. *Skripsi*. Universitas Andalas.

¹⁷ Akbar Asyari. 2022. Pengaruh Kesadaran Politik Masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Skripsi*. Universitas Andalas.

gender memiliki pengaruh akan keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) Tahun 2024 dari KPU Kota Bukittinggi, dengan total jumlah 310 calon tetap, ada sebanyak 113 calon legislatif perempuan dan 197 calon legislatif laki-laki yang mendaftar untuk perebutan 25 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi. Artinya, kesadaran perempuan pada keikutsertaan berpolitik sudah mengarah pada keterwakilan yang cukup dan sudah melebihi kuota 30% keterwakilan perempuan. Serta kesadaran politik gender yang dimiliki masyarakat memiliki pengaruh terhadap meningkatnya keterpilihan caleg perempuan tersebut.

Dari data yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi bahwasanya menghasilkan delapan orang anggota legislatif perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Bukittinggi. Hal ini memperlihatkan kesuksesan dalam pelaksanaan capaian 30% keterwakilan perempuan dan masih butuh aspek lainnya, salah satu aspek tersebut didapatkan dari kesadaran masyarakat akan kepemimpinan perempuan. Maka dari itu, fokus pada penelitian ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh kesadaran politik gender terhadap keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan jumlah representasi perempuan dalam ranah politik membatasi dan mengecilkan peran perempuan seutuhnya di lingkungan politik. Padahal keterwakilan perempuan dalam politik telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Keterwakilan perempuan dalam bidang legislatif sangat penting, karena Undang-Undang di Indonesia juga mengamanatkan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali perempuan. Indonesia yang juga salah satu negara yang mendukung *Sustainable Development Goals* dengan salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender.¹⁸

Keterlibatan perempuan tersebut perlu diperhatikan untuk pengambilan keputusan publik karena dapat berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga negara dan publik terkhusus kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan perempuan. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan, sebaliknya masalah perempuan juga merupakan masalah masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.¹⁹

Terkait keterlibatan perempuan dalam ranah politik, pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi menunjukkan hal yang baik dengan tercapainya

¹⁸ KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik Melalui Seminar Nasional “Suksesi Suara Pemilih Pemula untuk Pemilu 2024” <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzOQ>. Diakses pada 19 September 2024 pukul 02.03 WIB.

¹⁹ Very Wahyudi. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*. Vol 1 No 1. Hal. 65

kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi bahkan lebih yaitu 32%. Sedangkan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tidak sesuai dengan harapan dan sangat jauh dari kuota 30% dan hanya mencapai kuota 8%. Pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi, calon legislatif yang mendaftar sebanyak 310 calon tetap, di antaranya 197 calon legislatif laki-laki dan 113 calon legislatif perempuan untuk perebutan 25 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dari jumlah 113 calon legislatif perempuan yang terdaftar, sebanyak delapan orang calon legislatif perempuan terpilih untuk duduk di kursi DPRD Kota Bukittinggi.²⁰ (lampiran satu)

Tabel 1.1
Daftar Anggota DPRD Kota Bukittinggi Perempuan Terpilih Tahun 2014, 2019 dan 2024

Tahun	Nama	Dapil	Partai Pengusung
2014-2019	Hj. Nursyida, A.Md.Pd	II	Demokrat
	Ir. Hj. Aisyah	II	Demokrat
2019-2024	Hj. Rahmi Brisma	III	PAN
	Hj. Noni, S.Sos	I	PAN
2024-2029	Berliana Betris, S.IP	I	Golkar
	Neni Anita, S.H.	I	Nasdem
	Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm	I	PKS
	Hj. Elfianis, A.Md	I	Demokrat
	Vina Kumala, S.E., Ak.,M.M	III	Demokrat
	Zulkhairahmi, S.Ak	III	Gerindra
	Dewi Anggarini, S.E.,M.M	III	PPP
Hj. Ir. Rahmi Brisma	III	PAN	

Sumber: Data Sekunder dari KPU Kota Bukittinggi tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Bukittinggi pada periode 2014-2019 dan 2019-2024 hanya menghasilkan dua orang anggota DPRD perempuan per periodenya dan masih jauh

²⁰ KPU Kota Bukittinggi.

dari target dalam memenuhi kuota 30% *affirmative action* dalam mengisi kursi legislatif. Tapi pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu terpilihnya sebanyak delapan orang perempuan dan ini melebihi dari kuota 30% tersebut yaitu 32%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi pada Pemilu baru ini sudah berhasil memenuhi ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peningkatan angka elektabilitas caleg perempuan yang terpilih pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi menjadi salah satu fenomena menarik dari bukti bahwa kesadaran akan kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik semakin terbuka lebar. Sering sekali potensi perempuan dianggap tidak *fair* oleh sebagian besar masyarakat kita yang mengakibatkan sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis.²¹

Peneliti melihat bahwa kesadaran politik akan gender yang dimiliki masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki pengaruh terhadap terpilihnya caleg perempuan. Kesadaran ini timbul dikarenakan adanya ketimpangan dalam kekuatan politik antara laki-laki dan perempuan. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa laki-laki dalam suatu jabatan politik karena adanya persepsi bahwa laki-laki memiliki karakteristik kepemimpinan yang lebih dihargai seperti keberanian, keputusan atau kemampuan memimpin dalam situasi menantang. Tetapi saat ini, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sudah

²¹ Dimiyati Huda. 2020. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press. Hal. 8.

melihat caleg perempuan memiliki kualitas dan wawasan yang luas serta karakteristik kepemimpinan yang sama dengan laki-laki.²²

Kesadaran gender membantu seseorang untuk memahami pentingnya keterwakilan gender yang seimbang dalam lembaga legislatif. Hal ini mendorong pemilih baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mendukung kandidat perempuan dan mengakui bahwa keberagaman dalam representasi perempuan di politik penting untuk mewakili kepentingan seluruh populasi. Adanya perubahan normatif ini juga mempengaruhi kesadaran politik gender di mana perempuan yang mendaftarkan diri untuk jabatan politik tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa atau tidak lazim.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pemilih perempuan yang memilih kandidat perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi, beliau mengatakan:²³

“Saya ingin memilih kandidat perempuan karena menurut saya keterwakilan perempuan dalam politik Kota Bukittinggi sangat kurang apalagi melihat kebelakang banyaknya caleg laki-laki yang terpilih tetapi tidak ada melakukan tindakan untuk kesejahteraan perempuan disini. Saya ingin kandidat perempuan yang terpilih ini dapat memajukan pemberdayaan perempuan karena memang perempuanlah yang juga dapat mengerti keadaan perempuan lainnya. Memang masih banyak juga masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesetaraan gender, semoga dengan banyaknya caleg perempuan yang terpilih ini, mereka akan memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender agar kedepannya semakin banyak perempuan yang terpilih, semakin maju juga pemberdayaan di Kota Bukittinggi ini.”

²² Perempuan dan Politik: Menyongsong Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. <https://berandainspirasi.id/perempuan-dan-politik-menyongsong-kesetaraan-gender-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>. Diakses pada Tanggal 9 Juli 2024 pukul 22.23 WIB.

²³ Wawancara dengan Ibu Yenni Santi selaku pemilih pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi, di rumah informan.

Masyarakat Kota Bukittinggi memiliki kecenderungan memilih berdasarkan rasa kedekatan dengan partai atau calon tertentu. Interaksi yang dibangun secara aktif dan berkelanjutan oleh partai politik atau calon kepada masyarakat, menciptakan perasaan emosional kepada calon, sehingga tanpa harus melakukan kampanye politik calon yang memang kesehariannya sudah sering berbaur dengan konstituennya menjadi mudah mendapatkan kepercayaan dan dipilih dalam kontestasi pemilihan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa saat ini masyarakat mau memilih calon legislatif perempuan.

Peneliti mendapatkan fakta setelah melakukan wawancara singkat dengan salah satu calon legislatif perempuan terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 lalu yaitu Hj. Ir. Rahmi Brisma dari Partai Amanat Nasional, beliau mengatakan:²⁴

“Masyarakat itu kenal baik dengan saya karena memang sehari-hari saya ada ditengah-tengah mereka. Setiap ada kegiatan di lingkungan tempat tinggal saya, saya biasanya ikut bergabung dengan mereka. karena mereka sudah kenal dan sama-sama dekat dengan saya dan partai saya, jadi waktu saya bilang saya mau naik, mereka sambut dengan baik”

Opini atas kualitas kepribadian tokoh partai atau calon yang berkontestasi dalam pemilihan juga termasuk kedalam perilaku memilih model psikologis. Perasaan dekat secara emosional juga terbangun melalui sejauh mana calon dikenal dan diketahui kualitasnya oleh para pemilih. Orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan calon pilihannya cenderung terdorong untuk ikut mengajak keluarga, kerabat dan orang-orang sekitarnya untuk ikut memilih.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Ir. Rahmi Brisma dari Partai Amanat Nasional selaku Calon Legislatif perempuan terpilih pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi di Kantor DPC PAN Kota Bukittinggi.

Wawancara singkat juga dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pemilih laki-laki yang menyatakan bahwa tidak ada salahnya pemilih laki-laki memilih calon perempuan. Lebih jelasnya beliau mengatakan:²⁵

“Saya waktu pemilihan caleg DPRD Kota memilih perempuan kok. Saya lihat calon ini masih muda, pandai berbaur dengan masyarakat dan juga pandai mengambil hati masyarakat. Menurut saya, saya yang laki-laki ini tidak masalah memilih perempuan karena sekarang kemampuan perempuan dalam memimpin sudah sama seperti laki-laki. Ini juga untuk memberikan jalan kepada anak muda agar ikut berpartisipasi langsung sebagai kandidat, bukan sekedar menjadi pemilih saja. Kapan lagi Kota Bukittinggi dipimpin oleh perempuan, kalau bisa laki-laki lima puluh persen dan perempuan juga lima puluh persen”

Berdasarkan paparan pernyataan dan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa meningkatnya keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif disebabkan adanya kesadaran politik yang dimiliki laki-laki maupun perempuan dengan anggapan bahwa perempuan pun berhak dipilih sebagai pemimpin yang mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih kandidat perempuan tersebut. Oleh karena itu, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kesadaran politik gender terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Bukittinggi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh kesadaran politik gender terhadap keterpilihan caleg perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Siri Antoni selaku pemilih pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Bukittinggi di Rumah Informan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Politik yang berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai kesadaran politik terhadap keterpilihan caleg perempuan, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai kesadaran politik, terkhususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyikapi kesadaran politik masyarakat Kota Bukittinggi terhadap perilaku memilih, sehingga bisa meningkatkan jumlah pemilih Kota Bukittinggi dalam memilih caleg perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait kesadaran politik dan partisipasi politik khususnya partisipasi dalam memilih pemimpin perempuan terutama pada pemilihan legislatif serta dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilihan legislatif.

